

TESIS

**KEABSAHAN YURIDIS KEWENANGAN APARAT PENEGAK HUKUM
DALAM PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE
JUSTICE) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA**



Diajukan oleh :

NAMA : FREDERIKUS EDWIN LAWANTO

NIM. 220215310091

PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN

JUNI 2024

**KEABSAHAN YURIDIS KEWENANGAN APARAT PENEGAK HUKUM
DALAM PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE
JUSTICE) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA**

Tesis

Program Magister Hukum

Diajukan oleh : FREDERIKUS EDWIN LAWANTO

NIM. 220215310091

PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN

JUNI 2024

Judul Tesis : KEABSAHAN YURIDIS KEWENANGAN APARAT
PENEGAK HUKUM DALAM PENERAPAN
Keadilan Restoratif (RESTORATIVE JUSTICE)
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA

Nama : FREDERIKUS EDWIN LAWANTO
NIM : 220215310091

PEMBUNBING

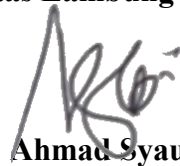


Hj. Rahmida Erliyani

NIP. 19730420 200312 2002

Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Ahmad Syaafi
NIP. 19720208 199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Achmad Faishal
NIP. 19750615 200312 1 001

LAWANTO, FREDERIKUS EDWIN. 2024. “Keabsahan Yuridis Kewenangan Aparat Penegak Hukum Dalam Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Menurut Perspektif Hukum Acara Pidana”. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Hj. Rahmida Erliyani. 102 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Keabsahan Yuridis, Keadilan Restoratif, Hukum Acara Pidana.

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Keabsahan Yuridis Kewenangan Aparat Penegak Hukum Dalam Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Menurut Perspektif Hukum Acara Pidana adalah untuk menganalisis dan mengetahui penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian dari perkara yang termasuk di dalam hukum pidana oleh instansi penegak hukum baik polisi, jaksa maupun hakim; serta untuk menganalisis keabsahan yuridis dari pendekatan *restorative justice* di dalam penerapan hukum acara pidana di dalam konsep KUHP dan KUHP oleh instansi penegak hukum baik polisi, jaksa maupun hakim yang terkotak-kotak oleh peraturan hukum internal masing-masing. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, konsep dan/atau teori, maupun atas asas-asas hukum.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, Pelaksanaan penyelesaian dalam perkara tindak pidana melalui keadilan *restorative*, Penyelidik atau Penyidik harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan-persyaratan baik materiil dan formiil sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka penyelidik atau penyidik bisa menghentikan penyelidikan atau penyidikan dengan alasan demi hukum. Dalam lingkup Kejaksaan Negeri penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara merujuk kepada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam ketentuan hukum PERJAN No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan prinsip Keadilan Restoratif. Kedua, Penerapan *restorative justice* oleh penegak hukum di Indonesia adalah sah dikarenakan *Restorative justice* diberlakukan untuk menjadi jalan keluar permasalahan yang menitikberatkan pemulihan akan hubungan antara pelaku dan korban yang kedua belah pihak diharuskan mencapai kesepakatan di dalam melakukan perdamaian dan pemulihannya. Konsep hukum ini sangat membantu berjalannya peraturan hukum pidana dikarenakan untuk pemaksimalan penerapan hukuman penal serta non penal bagi pelaku.

LAWANTO, FREDERIKUS EDWIN. 2024 “The Juridical Validity Of The Authority Of Law Enforcement Apparatus In The Implementation Of Restorative Justice According To A Criminal Procedure Law Perspective”. Master of Law Program, faculty of Law, Lambung Mangkurat University. Advisor : Hj. Rahmida Erliyani. 102 Pages.

ABSTRACT

Keywords: *Juridical Validity, Restorative Justice, Criminal Procedure Law.*

The purpose of the thesis research entitled Juridical Validity of the Authority of Law Enforcement Officials in the Implementation of Restorative Justice According to the Criminal Procedure Law Perspective is to analyze and determine the application of the restorative justice approach in the resolution of cases included in criminal law by law enforcement agencies, including the police, prosecutors and judges; and to analyze the juridical validity of the restorative justice approach in the application of criminal procedural law in the concept of the Criminal Code and Criminal Procedure Code by law enforcement agencies, including police, prosecutors and judges, which are divided by their respective internal legal regulations. This research uses a type of normative juridical research. This normative juridical research is carried out by carrying out an inventory of statutory regulations, concepts and/or theories, as well as legal principles.

*The results of the research obtained are **First**, Implementing resolution in criminal cases through restorative justice, Investigators or Investigators must first complete the requirements, both material and formal, as stated in Police Regulation of the Republic of Indonesia Number 8 of 2021. After all the requirements are fulfilled, then the investigator or the investigator can stop the investigation or investigations for legal reasons. Within the scope of the District Attorney's Office, the application of restorative justice in resolving cases refers to the principles of fast, simple and low-cost justice in the legal provisions of PERJAN No. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on the Principles of Restorative Justice. **Second**, the application of restorative justice by law enforcers in Indonesia is legal because restorative justice is implemented to be a solution to problems which focuses on restoring the relationship between the perpetrator and the victim where both parties are required to reach an agreement in carrying out peace and recovery. This legal concept really helps the implementation of criminal law regulations because it maximizes the application of penal and non-penal penalties for perpetrators.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagi Tuhan yang Maha Esa atas segala kasih, rahmat, karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **Keabsahan Yuridis Kewenangan Aparat Penegak Hukum Dalam Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Menurut Perspektif Hukum Acara Pidana.**

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Yang Terpelajar Ibu Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Penulisan Tesis saya yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu

berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;

4. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;
5. Rekan-rekan satu angkatan 2022 dan teman-teman dari Pengadilan Negeri, atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis

FREDERIKUS EDWIN LAWANTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Kajian Umum tentang Tujuan Pemidanaan	15
B. Kajian Umum tentang Restorative Justice	24
C. Kajian Umum tentang Hukum Pidana	28
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	52
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	53
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
A. Penerapan Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Perkara Pidana oleh Penegak Hukum baik Polisi, Jaksa Maupun Hakim.....	54

B. Keabsahan Yuridis Pendekatan Restorative Justice Di Dalam Penerapan Hukum Acara Pidana Di Dalam Konsep KUHP Dan KUHAP Oleh Instansi Penegak Hukum Polisi, Jaksa Maupun Hakim Yang Terkotak-Kotak Oleh Peraturan Hukum Yang Mengatur Internal Masing-Masing	78
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	